

PENYELESAIAN KASUS PENAMBANGAN PASIR ILEGAL
(Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RISWANDI

NIM: 10500112076

MAKASSAR

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RISWANDI
NIM : 10500112076
Tempat / Tgl lahir : Makassar, 16 Mei 1993
Jurusan /Prodi /Konsentrasi : Ilmu Hukum
Fakultas / Program : Syariah dan Hukum
Alamat : BTN Ranggong Permai Blok C8/9
Judul : *“Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal”*
(Studi Kasus Pertambangan Pasir di Kabupaten Gowa)

Menyatakan dengan kesungguhan dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang tertera dalam pernyataan adalah hasil karya sendiri. Dan jika di kemudian hari terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan duplikat, tiruan dan merupakan bentuk plagiat karya orang lain. Maka dengan ini proposal skripsi dan segala hal yang terkait di dalamnya karenanya batal demi Hukum.

Makassar, 16 Maret 2016

Penulis

Riswandi

NIM : 10500112076

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Study Kasus Pertambangan Pasir di Kabupaten Gowa)”, yang disusun oleh saudara Riswandi, NIM: 10500112076, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UTN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4, bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1437 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 4 April 2016 M.
26 Jumadil Akhir 1437 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H, M.H	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Marilang, M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, M.H	(.....)
Pembimbing II	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 195704141986031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alikum Wr. Wb

Alhamdulillah hilladzi akramnaa bil iimaan, wa a'azzanaa bil islam, wa rafa'na bil ihsan, ahmaduhu subhanahu wata'ala wa asykuruh, allahumma shollia wasallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa shahbihi wa mantabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du.

Segala puji hanya milik Allah SWT. dan shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “*Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*” (Studi Kasus Pertambangan di Kabupaten Gowa)”. Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat manusia dari masa kejahiliyahan menuju masa yang berperadaban.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerjasama berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi lebih dari itu merupakan

wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. Semoga keberadaan skripsi ini dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, memotivasi dan membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, diantaranya:

1. Ibunda tercinta Nur Asia, Ayahanda tercinta Muh. Amir yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M. Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II dan III.
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.A.g, selaku Deakan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II dan III.
4. Istiqamah, S.H, M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Jumadi SH., MH, selaku Pembimbing I dan Dr. M Thahir Maloko. MHi selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya dan pelayanan dalam penyelesaian studi mahasiswa.

7. Sahabat-sahabat kelompok pencinta alam KHATULISTIWA JEJAK yang telah menemani dan mendukung penulis dalam proses menyelesaikan studi.
8. Saudara-saudariku A. Widianawati, Nova Noviana, Fiqhi Jabbar, Ummuh Kalsum, Rijal Ajidin, Riswan.L, Nurul Kurnia, Siti Khadijah, A. Miftahuddin, Rosdiana Selvi. R.W, A. Bau Utari dan Desi Ma'rifah yang telah menemani hari-hari penulis dalam menimba ilmu.
9. Kakanda senior angkatan 2011 yang telah banyak menginspirasi penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Tidak terkecuali rekan-rekan mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus Kelompok IH B angkatan 2012 Jurusan Ilmu Hukum, selaku teman seperjuangan dalam menimba ilmu di baangku perkuliahan.

Akhirul kalam, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Makassar, 16 Maret 2016

Penulis

RISWANDI

NIM: 10500112076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertambangan.....	11
B. Asas-asas Hukum Pertambangan	13
C. Sumber-sumber Hukum Pertambangan	14
D. Jenis-jenis Pindak Pidana dalam Bidang Pertambangan.....	15
E. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Pertambangan	17
F. Izin Usaha Pertambangan.....	19
G. Sanksi yang dapat Dijatuhkan pada Kasus Pertambangan Ilegal.....	22
H. Kerangka Konseptual	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis	37
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Profil Singkat Pengadilan Negeri Sungguminasa	39
B. Proses penyelesaian perkara pidana pertambang andi Pengadilan Negeri Sungguminasa	43
C. Sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Implikasi.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

NAMA PENULIS : RISWANDI

NIM : 10500112076

**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN KASUS PENAMBANGAN
PASIR ILEGAL (Studi Kasus Pertambangan di
Kabupaten Gowa)**

Skripsi ini membahas Penyelesaian kasus penambangan galian pasir ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kab. Gowa yakni kasus dengan No Perkara : 49/Pid Sus/2015/PN. Sgm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus Penambangan Pasir Ilegal. dan bentuk sanksi hukum yang dikenakan bagi para pihak yang terkait.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif atau doctrinal. Adapun sumber data penelitian Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek yang di teliti. Data sekunder antara lain berupa peraturan perundang –undangan yang di teliti meliputi literature-literatur berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian. Data Tersier bahan-bahan yang bersifat menunjang data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Proses penyelesaian Kasus Penambangan ilegal di Kabupaten Gowa memiliki dua jenis proses; yakni litigasi dan nonlitigasi. Yang mana proses litigasi merupakan proses tindak pidana yang melalui jalur formal atau jalur pengadilan dengan mengikuti ketentuan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana pada umumnya pada peradilan tingkat pertama. Sedangkan secara non litigasi menjadi upaya alternatif yang ditempuh di luar pengadilan pada penyelesaiannya dengan melibatkan pihak terkait. (2) sanksi yang dijatuhkan pada kasus *illegal mining* berupa sanksi Pidana, sanksi Administratif dan sanksi Perdata namun pada kenyataan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa hanya berupa sanksi Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat¹, oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus di kuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata di antaranya pengelolaan di bidang tambang. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan dari bahan galian tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lain. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi aturan- aturan maupun kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab XIV, pasal 33.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang, maka penguasaan di serahkan oleh negara dan di selenggarakan oleh pemerintah.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang². Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terdiri dari 175 pasal dan XXVI bab mulai di undangkan pada tanggal 12 januari 2009 di kemukakan pokok pemikiran dan alasan yang menjadi pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir. Pertama karena mineral dan batubara yang di jelaskan dalam hukum pertambangan adalah kekayaan alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, kedua usaha pertambangan mineral dan batubara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan, Yang ketiga dianggap bahwa UU No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sudah tidak sesuai sehingga di butuhkan perubahan peraturan perundang-undangan yang memepertimbangkan perkembangan

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No 4 tahun 2009*, pasal 1(ayat 1).

nasional dan international mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan.³

Tantangan terbesar negara-negara kaya sumber daya alam di bidang tambang adalah maraknya tindakan kriminalisasi dan sudah menjadi rahasia umum. Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut *Illegal Mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.

Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa, kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya terhitung banyaknya kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Sungguminasa terkait masalah pertambangan pasir ilegal tanpa IUP, IPR atau IUPK. Yakni adanya faktor korelatif penyebab utama sehingga potensi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Gowa menjadi salah satu pusat produksi material tambang jenis mineral pasir, batuan, dan tanah timbunan serta bahan bangunan (chipping)/seplit, yang mencakup wilayah Kecamatan, Pallangga, Bontomarannu, Bajeng, Bontonompo, dan Parangloe yang mana hasil produksinya didistribusikan ke

³H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cet. I; Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 55.

beberapa daerah seperti Kota Makassar dan Kabupaten Takalar serta beberapa pulau di sekitarnya.

Dalam al-Qur'an juga sangat jelas perintah dan larangan Allah swt kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang akan menimbulkan kerusakan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Rum/30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahanya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”⁴

Ayat ini merupakan peringatan tegas Allah bahwa seluruh kerusakan atau korupsi pada alam adalah perbuatan jahat dan karenanya manusia harus bertaubat. Ayat ini memastikan pangkal penyebab kerusakan di muka bumi ini adalah bentuk pelanggaran dan penyimpangan manusia terhadap ketentuan syariah-Nya, dan Allah menghendaki hukuman bagi mereka yang melakukan kemaksiatan di muka bumi.⁵

Membicarakan pelestarian lingkungan dalam dunia pengetahuan biasa disebut dengan ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik

⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 404.

⁵ <http://www.alwishihab.com/artikel/2014/9/20/ilmu-modern-adaptasi-umat-islam-harus-mendukung-pembangunan-manusia-dan-lingkungan-oleh-alwi-shihab>, (Diakses 30 Maret 2016).

antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, ahli biologi Jerman pada tahun 1869, terdiri dari kata “oikos” yang berarti rumah atau tempat tinggal dan “logos” yang berarti telaah atau studi, sebagai suatu ilmu yang sistematis dan terstruktur, ilmu ekologi telah berkembang pesat pada tahun 1900-an, kemudian lebih pesat lagi dalam dua dasawarsa terakhir ini.⁶

Sebagai pelaku sejarah, manusia paling bertanggung jawab dalam konservasi alam dan kelestarian ekologi. Para ahli terus melacak penyebab utama dari kerusakan alam. Sebagian yang lain menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat sikap dan pandangan (*world view*) yang menyimpang dari falsafat kehidupan dan keagamaan⁷

Membicarakan lingkungan dalam perspektif falsafat Islam dimulai dari konsep kosmologi. Para filosof Islam, semisal Al-Kindi (801 – 873 M) telah mengemukakan bahwa alam merupakan emanasi dari Tuhan. Al-Farabi (870 – 950 M) lebih merinci konsep emanasi tersebut melalui konsep akal sepuluh.⁸ Meski konsep ini agak susah dipahami dalam konteks ilmu tauhid tradisional, tetapi dalam konteks ekologi, karena dari pancaran Tuhan, maka semesta alam memiliki posisi yang sangat tinggi. Merusak alam sama dengan merusak Tuhan. Dalam ruang hukum Islam (fikih),

⁶ Soedjiran Resosoedarmo, dkk., *Pengantar Ekologi* (Bandung: Rosda, 1993), hal. 1.

⁷ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Jakarta: Mizan, 1997) h. 158. Dikutip dalam, Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, (Jawa Timur: Yayasan Amanah, 2006), hal. 42.

⁸ Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Cet. XII; Jakarta: PT Bulan Bintang, 2008), hal. 16-17.

persoalan lingkungan ini dikenal dengan istilah *fiqh al-bi'ah* atau di Indonesia biasa disebut dengan fikih lingkungan

Istilah fikih lingkungan sendiri di Indonesia baru dipopulerkan oleh kalangan ahli fikih ke tengah-tengah umat Islam pada abad ke-21 ini. Literatur-literatur Islam klasik, baik di wilayah timur tengah, maupun di tanah air dalam penelusuran yang saya lakukan tidak menyinggung secara eksplisit tentang fikih lingkungan. Hal ini merupakan satu fakta bahwa meski mujtahid muslim produktif dalam menjawab persoalan umat pada zamannya, tetapi hanya terfokus kepada masalah-masalah ritual, belum menyentuh masalah-masalah sosial yang lebih luas, termasuk masalah ekologi.

Hadirnya fikih lingkungan disebabkan oleh dua hal. Pertama, sifat fikih yang umumnya sebagai respon terhadap kondisi riil masyarakat dan lingkungannya. Kedua, disebabkan oleh tradisi fikih yang hanya mengulang, mengurai, dan menyimpulkan karya-karya sebelumnya. Namun demikian dapat dipahami apabila secara umum aturan mengenai pemanfaatan alam bagi kehidupan manusia bertujuan untuk tetap terjaganya keadilan (adalah) dan kemashlahatan (*mashlahah*) bagi kehidupan manusia. Dengan pemahaman semacam ini konsepsi Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin akan tetap terjaga.

Adapun di dalam al-Qur'an yang menunjukkan betapa perhatian Islam sangat besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah Q.S. al-A'raf/7:56, yang berbunyi

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahanya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁹

Akhir-akhir ini muncul fenomena menarik tentang penyebab bencana alam yang menimpa manusia. Satu di antara penyebab terjadinya longsor dan banjir bandang serta rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem. Bencana ini bisa jadi akibat dari kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Oleh sebab itu, penambangan mampu memicu kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam.

Masalah penambangan pasir patut diangkat menjadi masalah hukum oleh karena banyak sekali di daerah Indonesia yang memanfaatkan pasir sungai sebagai lahan pencari keuntungan secara ekonomi. Termasuk daerah yang masyarakatnya

⁹ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 151.

melakukan penambangan pasir untuk diperjual-belikan adalah di Kabupaten Gowa kecamatan Bajeng Barat.

Berdasarkan atas Penerapan dan pelaksanaan sampai pada penegakan Undang-Undang terhadap pengelolaan sumber daya alam dan bahan galian tambang yang di kuasai oleh negara yakni pemerintah pusat, yang di wakili oleh Menteri Energi dan Sumber daya mineral sebagai pejabat yang berwenang sebelum berlakunya otonomi daerah, setelah berlakunya otonomi daerah kewenangan dalam hal pemberian izin tidak hanya menjadi kewenangan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, tetapi kini telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui gubernur dan bupati/walikota sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan terletak dalam wilayah laut.

Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal yang di lakukan oleh lembaga hukum pemerintah di Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi satu-satunya tolak ukur penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi karena adanya kegiatan tambang di kabupaten Gowa. Hal ini tentu dapat berdampak pada usaha negara untuk melakukan mengelolahan dan pemanfaatan sumber daya alam, berdasarkan akumulasi yang di ketahui terkait jumlah kerugian negara yang di timbulkan akibat adanya kriminalisasi dalam bisnis tambang terlebih permasalahan lingkungan yang

menyampingkan *good mining practice*. Sampai pada penjatuhan hukuman kepada pihak yang terkait berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dari uraian latar belakang tersebut, dianggap perlu bagi peneliti untuk mengkaji dan meneliti masalah ini. Dan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (studi kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa).**

B. Fokus Penelitian dan Diskripsi Fokus

Berdasarkan latar belakang yang menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini sebagai representatif dan gambaran umum yang akan di jelaskan, sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan pembaca dalam memahami variabel-variabel proses penyelesaian kasus penambangan ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang diselesaikan lewat jalur hukum dengan mencermati hasil putusan yang di keluarkan oleh majelis hakim terkait tindak pidana pertambangan ilegal. Dalam penelitian ini juga akan dibahas bentuk sanksi yang dijatuhkan pada pelaku yang terlibat penambangan secara liar, dimana pada pembahasannya peneliti mengkaji dari putusan majelis hakim yang memutus perkara pertambangan ilegal di Kabupaten Gowa tepatnya pada Kecamatan Bajeng Barat Desa Madalle di Dusun Tamatia

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus Penambangan Ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
2. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus Penambangan ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada penambangan Pasir ilegal di Kabupaten Gowa.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagi mahasiswa khususnya fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang Pertambangan.
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya terkhusus pada hukum pidana yang berkaitan dengan Pidana Pertambangan.
3. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literature dalam penegakan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Hukum pertambangan adalah : “hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah”.

Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.¹

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an undang-undang yang mengatur tentang pertambangan yaitu undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya

¹ H.Salim HS., S.H.,M.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010), h. 16.

pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan defenisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara. Yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi klayakan, kontroksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Hukum pertambangan di bagi dalam dua macam, yaitu :

1. Hukum pertambanagn Umum
2. Hukum pertambanagn Khusus

Hukum Pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law*(inggris). *Algemene mijnrecht* (Belanda), *den algemeneinen Bergrecht*(Jerman). Hukum pertambangan Umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan Gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara serta air tanah.

Istilah hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *special mining law*, dan bahasa Belanda disebut dengan *speciale mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *besondere gesetze bergbau*, yang

²H.Salim HS., S.H.,M.S. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*.(Jakarta: Sinar Grafika. 2012), h. 11.

dimaksud hukum pertambangan Khusus, yaitu mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah mineral diartikan sebagai benda padat homogen yang bersifat tidak organis yang terbentuk secara alamia dan memiliki komposisi tertentu yang jumlahnya sangat banyak seperti emas, tembaga ,intan dan pelican serta sebagai barang tambang.

Kontruksi pengertian mineral tersebut sebagai senyawa anorganik memiliki ciri atau karakteristik, yaitu :

1. Bersifat fisik
2. Bersifat kimiawi
3. Bersifat tak terbarukan
4. Memiliki susunan keristas tertentu.
5. Jika unsur – unsur kimia tersebut menggabung atau terkeristal akan membentuk batuan.
6. Terbentuk secara alamia di alam (natural).⁴

B. Asas - Asas Hukum Pertambangan

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Telah ditentukan asas–asas hukum pertambangan , mineral dan batu bara. Ada 7 asas pertambangan mineral dan batubara. Ketujuh asas itu, meliputi :

³H.Salim HS., S.H.,M.S. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, h.14.

⁴H.Salim HS., S.H.,M.S. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, h. 22.

1. Manfaat
2. Keadilan
3. Keseimbangan
4. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
5. Partisipatif
6. Transparansi
7. Akuntabilitas
8. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁵

C. Sumber Sumber Hukum Pertambangan

Sumber hukum pertambangan mineral dan batu bara di bagi menjadi 2 bagian yaitu yang bersumber dari hukum yang berlaku di indonesia dan hukum yang berlaku di negara lain.

Hukum yang berlaku di indonesia yaitu UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara merupakan ketentuan atau undang – undang yang menggantikan UU No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan.

Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari negara asing, yaitu :

1. Mineral Resources Law of the People's Republic of China.

⁵H.Salim HS., S.H.,M.S. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, h. 22.

2. Japanese Mining Law No.289, 20 Desember, 1950 Latest Amendment in 1962.
3. Philippine Mining Act of 1995.

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan

Sebelum membahas jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah jenis-jenis sanksi pidana pada umumnya. Sanksi pidana terbagi dua yaitu :

1. Pidana pokok; pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok terbagi atas 5 macam yaitu : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan.

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.⁶

Dalam pasal 12 KUHP menjelaskan bahwa pidana penjara berkaitan dengan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara, (seumur hidup, selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut, dan selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20

⁶Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 11.

tahun, boleh dijatuhkan 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati atau seumur hidup.

Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara, lamanya pidana kurungan adalah paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan jika ada pidan yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, pidana kurungan sekali-kali tidak boleh melebihi satu tahun empat bulan.

Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan oleh bagi para politisi yang melakukan kejahatan oleh ideolog yang dianutnya.⁸

Pencabutan hak-hak tertentu adalah proses, perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan atau

⁷Pasal 66 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸Guse Prayudi, *Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting Untuk Diketahui* (Jakarta: Roya book, 2008), h. 26.

kewenangan dari terpidana atau terhukum untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

2. Pidana tambahan; pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tidak hanya pidana pokok, tapi juga pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari tiga macam, yaitu : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.⁹

E. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Pertambangan

Dalam pasal 158 dan pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan adalah :

1. Orang perorangan

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.

2. Pengurus badan hukum\

Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.

3. Badan hukum

⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 10.

Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban.¹⁰

F. Izin Usaha Pertambangan

1. Izin Usaha Pertambangan

a. Pengertian izin usaha pertambangan

Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

1) Illegal mining

illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

2) Legal mining

legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu mining permit .

¹⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11.

(IUP) merupakan. “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan” (pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Minerba) “¹¹

b. dasar hukum izin usaha pertambangan

izin usaha pertambangan (IUP) di atur dalam Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Serta beberapa undang – undang yg di jabarkan dalam bentuk peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 22 Tahun 2010, peraturan pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambang mineral dan batubara, peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha tambang mineral dan batubara. Serta peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

c. tahapan pemberian izin usaha pertambangan (IUP)

Dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara menjelaskan bahwa pemberian izin usaha pertambangan memiliki 2 tahapan yaitu ; pertama IPU ekplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi dan study kelayakan. Dan yang kedua IUP oprasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

IUP ekplorasi sebagaimana di maksud pada ayat 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang – kurangnya :

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 1 angka 7.

1. nama perusahaan
2. lokasi dan luas wilayah
3. rencana umum tata ruang
4. jaminan kesungguhan
5. modal infestasi
6. perpanjangan waktu tahap kegiatan
7. hak dan kewajiban pemegang IUP
8. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan
9. jenis usah yang di berikan
10. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan
11. perpajakan
12. Penyelesaian perselisihan
13. Yuran tetap dan yuran eksplorasi
14. amdal

IUP Oprasi Produksi sebagaimana di maksud pada pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat sekurang – kurangnya :

1. Perusahaan
2. luas wilayah
3. lokasi penambangan
4. lokasi pengelolaan dan pemurnian

5. pengangkutan dan penjualan
6. modal infestasi
7. jangka waktu berlakunya IUP
8. jangka waktu tahap kegiatan
9. penyelesaian masalah pertanahan
10. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang
11. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang
12. perpanjangan IUP
13. hak dan kewajiban pemegang IUP
14. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
15. Perpajakan
16. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi penyelesaian perselisihan.
17. Keselamatan dan kesehatan kerja
18. Konservasi mineral dan batubara.
19. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri
20. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik
21. Pengembangan tenaga kerja indonesia
22. Pengelolaan data mineral atau batu bara
23. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara

G. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan pada Kasus Pertambangan Ilegal

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada subjek hukum yang telah ditentukan dalam pasal 158 sampai dengan pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Ada tiga jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku orang perorangan, yaitu : pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan.

Sementara itu, ada tujuh jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum orang yaitu meliputi :

a. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha penambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambang tidak sah (*illegal mining*). Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana. Dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 5 pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, kelima pasal itu meliputi :

1) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

memgatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP , yaitu :

a) Bupati/walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah kabupaten/kota.

b) Gubernur apabila WIUP berada dilintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

3) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang IUP Operasi Produksi, IUP operasi produksi diberikan oleh :

a) Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/atau kota.

b) Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah kabupaten /atau

yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada diwilayah provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

4) Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan bupati/walikota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.

5) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa adanya izin dari bupati/walikota, gubernur dan menteri, yaitu:

1. Pidana penjara

Pidana penjara paling lama 10 tahun

2. Pidana denda

Pidana dendanya paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

b. Menyampaikan Laporan Tidak Benar atau Keterangan Palsu

Dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan enam pasal yang dilanggar oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK yang berakibat dijatuhkannya pidana penjara dan denda kepada pelaku. Keenam pasal itu meliputi :

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada pemberi IUP.
2. Pasal 70 huruf e Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemberi IPR untuk mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.
3. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur kewajiban pemberi IUPK eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada menteri.
4. Pasal 105 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang tergali untuk menyampaikan hasil penjualan mineral dan atau batubara yang tergali

kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

5. Pasal 110 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
6. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Keenam pasal itu, mengatur tentang memegang usaha IUP, IPR dan IUPK untuk menyampaikan laporan atau keterangan baik yang berkaitan dengan; ditemukannya mineral atau batubara yang tergali, mengelola lingkungan hidup, menyampaikan laporan tentang penjualan mineral atau batubara, menyerahkan seluruh data dan laporan tertulis atas rencana kerja, dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

- c. Melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK

Dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK. Dalam ketentuan ini ada dua pasal yang dilanggar, yaitu :

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP
2. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan IUPK, pejabat yang berwenang memberikan IUPK yaitu menteri energi dan sumber daya mineral.

Sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK telah ditentukan dalam pasal 160 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, memiliki :

1. Pidana kurungan paling lama 1 tahun
2. Denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku ini bersifat alternatif, artinya bahwa pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan saja atau denda saja.

d. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi

Pemegang IUP hanya diberikan hak untuk melakukan satu kegiatan, namun apabila kegiatan itu telah selesai dilakukan, maka orang tersebut dapat mengajukan IUP berikutnya.

Dalam pasal 161 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, Sanksinya berupa :

1. Pidana penjara paling lama lima tahun

2. Denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Sanksi bagi pelaku dalam ketentuan ini tidak hanya pidana penjara tapi juga denda. Jadi sanksinya, yaitu pidana penjara dan denda.

- e. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IUPK.

Pada dasarnya, yang dapat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara adalah orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin. Namun, bagaimanakah dengan orang yang menampung mineral atau batubara yang bukan berasal dari orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin itu sendiri. Jawaban tentang hal ini telah ditentukan dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 10 pasal yang dilanggar, yaitu :

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP
2. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain untuk mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP eksplorasi yang telah menemukan mineral dan

batubara pada saat melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan dan mineral dan batubara tersebut ingin dijual kepada pihak lainnya, maka pemegang IUP wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

4. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yaitu berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP operasi produksi.
5. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.
6. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan menteri dalam memberikan IUPK dengan memperhatikan kepentingan daerah.
7. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan pemegang IUPK eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
8. Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Tempat pengolahan dan pemurnian itu dilakukan didalam negeri.

9. Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan larangan melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK. Ini mengandung arti yang dapat melakukan pengolahan dan pemurnian adalah pemegang IUP, IPR dan IUPK.
10. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang digali untuk terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan.

Kesepuluh pasal yang dilanggar itu dapat dipilah menjadi dua pasal yang dilanggar, yaitu :

1. Melanggar IPR, IUP dan IUPK yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Tidak melaksanakan kewajiban dari pemegang IUP, IPR dan IUPK sendiri untuk mendapatkan izin baru, seperti IUP operasi produksi untuk penjualan.

Sanksi hukum bagi pelanggaran salah satu dari kesepuluh pasal diatas yaitu :

1. Sanksi pidana, paling lama sepuluh (10) tahun penjara

2. Sanksi denda, paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

2. Sanksi Perdata

Dalam perspektif hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (B.W.)/Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, juga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini meskipun merupakan ketentuan ruang lingkup perdata, namun demikian dapat diterapkan dalam ruang lingkup hukum pidana yang terkait dengan kerugian keuangan negara.¹² Pasal 145 Ayat (1) Undang- Undang Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Pada ayat (2) disebutkan Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa. 1994). H. 310.

3. Sanksi Administratif

Pengertian sanksi administratif terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan sanksi administrasi di Bidang Cukai. Sanksi administrasi adalah:

“sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.”¹³

Sanksi tersebut dijatuhkan atau dipaksakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang tanpa menunggu perintah pengadilan. Di Indonesia diasumsikan bahwa penjatuhan sanksi administratif mensyaratkan kaitan yang telah ada sebelumnya, seperti izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan bisnis. Sanksi administratif dapat didasarkan kepada pelanggaran sesuatu atau beberapa kondisi yang disyaratkan oleh izin tersebut.¹⁴

Di Indonesia yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggarannya, yaitu:

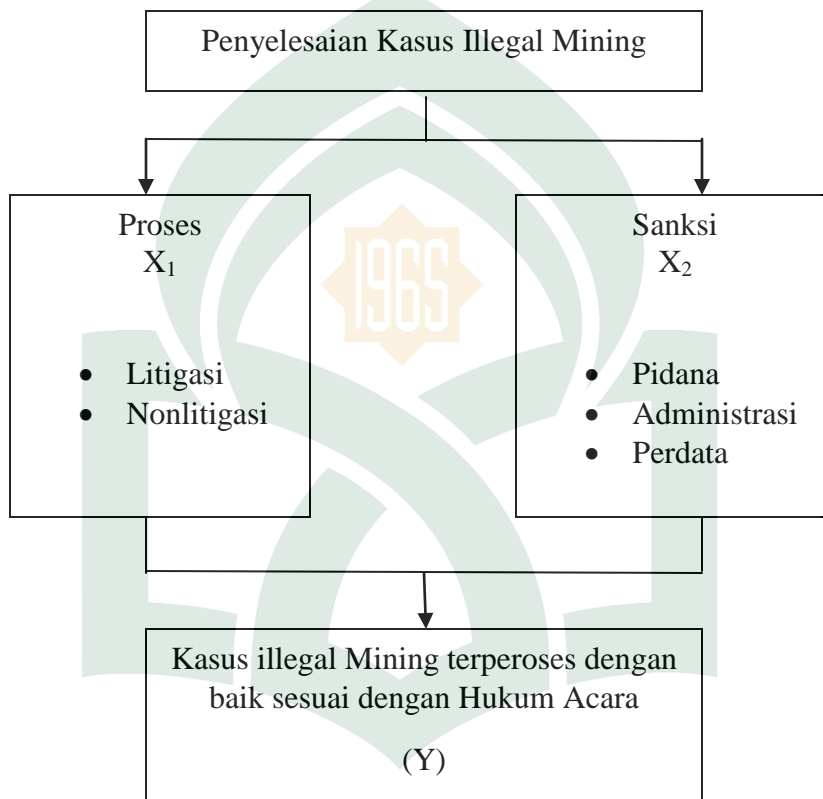
- a. Menteri;
- b. Gubernur; dan
- c. Walikota/Bupati.

¹³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai*, pasal 1.

¹⁴ H.Salim HS., S.H.,M.S., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, h. 267.

H. Kerangka Konseptual

Bagan 1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam konteks pemahaman penelitian hukum, maka peneliti ini selain berjenis penelitian hukum secara normatif, juga tertuang di dalam penelitian hukum secara emperis. Berdasarkan bentuk, penelitian ini tergolong penelitian lapangan kualitatif (*field of Qualitative Research*). Sedangkan tata cara atau metode yang di gunakan, penelitian ini berjenis evaluatif formatif. Louise kiddler mengemukakan bahwa penelitian evaluatif formatif merupakan penelitian yang berfungsi menjelaskan fenomena dari peroduk, program atau kebijakan yang menekankan pada afektivitas dari produk, program atau kebijakan tersebut.¹ Sedangkan tingkat dari eksplanasi dari penelitian ini , maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang berfungsi mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat komparasi dan atau asosiasi dengan variable lainnya.²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa provinsi sulawesi selatan yang berkaitan dengan penyelesaian kasus penambangan ilegal.

¹ Louise kiddler, “*research methods in sicial relation*”, dalam Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Cet. XII : Bandung : Alfabeta, 2005), h. 10.

² Louise kiddler, “*research methods in sicial relation*”, dalam Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, h. 11.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa adalah sebuah lembaga pemerintah di bidang hukum yang menyelesaikan tindak pidana pertambangan di kabupaten Gowa sebagai upaya hukum terakhir yang di tempuh oleh pihak dalam penyelesaian kasus pertambangan yang terjadi. Adanya putusan yang di dikeluarkan oleh hakim pengadilan negeri Sungguminasa Gowa menjadi pertimbangan tersendiri bagi peneliti berlandaskan pada asas keadilan dan kemanfaatan dan kepastian hukum. Olehnya itu perlu adanya penelitian mengenai hal tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penilitian yang di gunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Disebut hukum doktrinal, karena peneliti ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan peneliti ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang – undangan atau dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen.

³Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Peraktek*”(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 13.

Jenis data yang di butuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek yang di teliti.⁴
2. Data sekunder antara lain berupa peraturan perundang –undangan yang di teliti meliputi literature-literatur berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian
3. Data Tersier bahan-bahan yang bersifat menunjang data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang relevan dengan masalah yang dibahas peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Wawancara (Interview)

Yaitu dengan bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkaitan dan berkompeten dalam memberikan informasi yang akurat kepada peneliti.

- b. Studi Dokumentasi

⁴ Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian* (Cet. I: Jakarta: Mitra Wacana Media, 2002), h.12

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang meliputi literatur buku, makalah, jurnal baik pada media cetak maupun media online, artikel-artikel ilmiah, makalah, dan hasil penelitian terdahulu.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari literature yang ada.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengolahan kualitatif dan Analisis data secara kualitatif dalam artian bahwa data bersifat deskriptif, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan, potret dan dokumen yang terkait dengan penelitian.

G. Penguji Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai berikut :

1. Deskriptif digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.

2. Komperatif yang digunakan dalam membandingkan perbedaan pendapat terutama pada materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman.
3. Dedukatif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melengkapi penulisan hukum yang dilakukan ini, maka dalam bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh selama masa penelitian yang berhubungan dengan penyelesaian tindak pidana pertambangan di pengadilan negeri sungguminasa. Data ini diperoleh dari beberapa arsip yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan yang diperkarakan pada tahun 2015. Serta penyajian dari hasil wawancara masyarakat di lapangan kemudian ditinjau dengan undang-undang yang terkait dengan maksud menemukan kebenaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau

sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan.¹

2. Profil singkat Pengadilan Negeri kelas 1B Sungguminasa

Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa di sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada tahun 1964 setelah keluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 1 Ayat (4) tertulis:

“Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151), diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksudkan pada ayat (3), sehingga wilayahnya meliputi: 1.Daerah Tingkat II Mamudju, 2.Daerah Tingkat II Madjene, 3116 3.Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa, 4.Daerah Tingkat II Tana Toradja, 5.Daerah Tingkat II Pinrang, 6.Daerah Tingkat II Enrekang, 7.Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang, 8.Daerah Tingkat II Soppeng, 9.Daerah Tingkat II Barru 10.Daerah Tingkat II Pangkadjene dan Kepulauan, 11.Daerah Tingkat II Maros, 12.Daerah Tingkat II Gowa, 13.Daerah Tingkat II Takalar, 14.Daerah Tingkat II Jeneponto, 15.Daerah Tingkat II Bantaeng, 16.Daerah Tingkat II Bulukumba, 17.Daerah Tingkat II Selayar, 18.Daerah Tingkat II Sinjai, 19.Daerah Tingkat II

¹Pemerintah Kabupaten Gowa, “ Dinas Pertambangan Energi”, *Official Website Pemerintah Kabupaten Gowa*, <http://gowakab.go.id/skpd-gowa/dinas/dinas-pertambangan-energi> ,(9 Maret 2016).

Bone, 20.Daerah Tingkat II Wajo, 21.Daerah Tingkat II Luwu, 22.Kotapraja Pare-Pare dan 23.Kotapraja Makassar.”²

Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan

Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Pada Pasal 25 tertulis:

*“Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Daerah Hukum Pengadilan Negeri pada azasnya meliputi satu Daerah Tingkat II”.*³

Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar.Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sul-Sel cabang Gowa). Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan Makassar sampai dengan tahun 1970-an. Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi Pengadilan Negeri

² Republik Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang, Pasal 1.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Pasal 2.

Sungguminasa Kelas II A. Pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan Sekretariat Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari Kelas II menjadi Kelas . Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005.⁴

Pengadilan Negeri Sungguminasa beralamat di Jl. Usman Salengke No. 103 Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Luas wilayah kerja Pengadilan Negeri Sungguminasa yang terdiri dari 18 Kecamatan adalah 1.883,33 kilometer persegi, yakni Kecamatan Somba Opu, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Pattallassang, Bontomarannu, Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao,

⁴“Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa”, *Situs Resmi Pengadilan Negeri Sungguminasa*. http://www.pnsungguminasa.go.id/ver3/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=108, (22 Februari 2016).

Parigi, Bungaya, Bontolempang, Biringbulu, dan Tompobulu. Dengan 9 kecamatan yang berada pada ketinggian 100 meter dari permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gowa secara umum sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kotamadya Makassar, Kabupaten Maros ;

Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Bone, Bulukumba dan Bantaeng ;

Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Jeneponto ;

Sebelah Barat : Kotamadya Makassar dan Kabupaten Takalar ;

B. *Proses penyelesaian kasus Penambangan Ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa.*

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pemurnian dan penjualan terhadap sumber daya alam, yang berupa mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih maupun batu bara. Kegiatan tersebut tidak selalu dilaksanakan dengan baik dan selalu menimbulkan masalah. Masalah itu tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan kontraktor baik secara legal untuk pemegang IUP, IPR atau IUPK dan secara ilegal tapi juga terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵

Apa yang dimaksud dengan proses peradilan pidana, kadangkala dalam pemahaman masyarakat awam dipersamakan dengan batasan sistem peradilan pidana. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan kasus-kasus pidana hingga menjadi suatu putusan (vonnis), termasuk terhadap kasus pertambangan pasir ilegal.

⁵H.Salim HS., S.H.,M.S.,*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*,(Jakarta: Sinar Grafika. 2012), h. 210.

Berkaitan dengan hal di atas, terlebih dahulu dipahami batasan tentang sistim peradilan pidana dan proses peradilan pidana. Pada dasarnya sistim peradilan pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *Criminal Justice Science*. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistim peradilan pidana merupakan sistim dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁶

Dalam sistim peradilan pidana, sebenarnya “sistem” amat penting eksistensinya, karena apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodiputro kemungkinan terdapat 3 kerugian, yaitu sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistim dari SPP); dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistim peradilan pidana.⁷

⁶ Mardjono Reksodiputro., *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.1994), h. 84

⁷Mardjono Reksodiputro., *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, h. 85

Sementara Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah : sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.⁸

Muladi memberikan pemikiran bahwa sistim peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlihat formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

1. sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
2. sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); dan
3. sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dapat menhayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana.⁹

Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

⁸Mardjono Reksodiputro., *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, h. 86.

⁹ Muladi. *Teori – teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT.Alumni. 1994), h. 2.

Dalam perspektif kasus tindak pidana pertambangan secara ilegal, sub-sistim dalam sistim peradilanannya sama dengan sistem peradilan biasa, dimana terhadap para terdakwa sebagai suatu kajian hukum akan diserahkan kepada aparat yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana (ada Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim pemutus perkara, dan Lembaga Kemasyarakatan). Adanya kegiatan tambang memunculkan berbagai bentuk sengketa dimana sengketa itu sendiri di artikan secara umum adalah “konflik atau pertentangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tambang”. Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan atau biasa disebut dengan non litigasi.¹⁰

1. Litigasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor pengadilan negeri sungguminasa terkait penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan mengikuti ketentuan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana pada umumnya pada peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri sungguminasa adalah sebagai berikut :

Peradilan pidana ditingkat kepolisian Setelah menerima laporan, pengaduan atau tertangkap tangannya pelaku tindak pidana maka penyidik (pejabat kepolisian) menyelidiki tentang ada atau tidak terjadinya tindak pidana dalam hal ini disebut

¹⁰Felix MT. Sitorus., *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria* , (Bndung; Yayasan Akatiga. 2002), h. 11 .

tindakan Penyelidikan. Dalam KUHAP pasal 1 penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut ketentuan KUHAP. Apabila penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari dan mengumpulkan bukti maka penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang (memeriksa) yang dicurigai dan menanyakan identitasnya
- d. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian.
- e. Melakukan pengkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- j. Mengadakan penghentian penyidikan
- k. Tindakan lain yang bertanggung jawab
- l. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum¹¹

Membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan Penyidik dalam setiap tindakan penyidikan harus membuat berita acara terhadap semua tindakan-tindakan penyidikan seperti :

- 1) Pemeriksaan tersangka
- 2) Penangkapan
- 3) Penahanan

¹¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, pasal 6 ayat (1).

- 4) Pengeledahan
- 5) Pemeriksaan rumah
- 6) Penyitaan benda
- 7) Pemeriksaan surat
- 8) Pemeriksaan saksi
- 9) Pemeriksaan di tempat kejadian
- 10) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada penetapan dan putusan)¹²

Dari kejaksan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam hal ini ditangani oleh panitera muda pidana. Panitera muda pidana kemudian memberikan tanda terima pelimpahan berkas setelah petugas pendaftaran memberikan nomor perkara dan mempersiapkan semua formulir dan dokumen yang dibutuhkan kedalam berkas perkara. Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Panitera/Sekretaris untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh panitera/sekretaris, ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa kemudian menunjuk majelis hakim dalam jangka waktu 3 hari kerja. Setelah itu Panitera/Sekretaris menunjuk panitera pengganti. Dalam jangka 1 (satu) hari petugas pendaftaran harus menyerahkan berkas kepada ketua majelis yang ditunjuk. Selanjutnya ketua majelis memeriksa berkas dan mempelajari perkara, menetapkan hari sidang pertama, paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya berkas oleh Ketua Majelis Hakim dan berkas perkara harus sudah di Ketua Majelis Hakim paling lama 3 hari kerja setelah Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa. Setelah itu berkas perkara diserahkan kepada panitera pengganti dan hakim-hakim anggota, panitera pengganti menerima berkas perkara dan memberikan salinan penatapan hari

¹² <http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html> (Diakses 1 April 2016)

sidang pertama kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dan hakim anggota mempelajari berkas perkara. Setelah itu jaksa penuntut umum memberitahukan terdakwa jadwal persidangan dan menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang telah ditentukan. Kemudian para pihak hadir pada jadwal yang telah ditentukan untuk sidang pertama sampai pada sidang putusan.

Proses penyelesaian tindak pidana pertambangan yang dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa dianggap telah sesuai dengan ketentuan undang-undang beracara. Berdasarkan wawancara dilakukan oleh penyusun kepada Amran S Herman, SH (Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa) mengatakan ;

“kalau tindak pidana pertambangan yang kita tangani di gowa ini tidak ada ji hambatan tetap gas full aja jadi tindak pidana pertambangan itu ya kita sidang panggil keterangan ahlinya kan memperhatikan perdanya juga kalo memenuhi unsur-unsurnya yah kita putus sesuai tingkat pelanggaran pidananya”¹³

Setelah mendengar dan menyimak pernyataan oleh hakim di Pengadilan Negeri sungguminasa dikatakan bahwa tindak pidana pertambangan pasir yang diproses di pengadilan tidak memiliki hambatan dalam penyelesaiannya artinya tidak ada perlawanan para terdakwa perkara pertambangan pasir tersebut hingga jatuhnya putusan. Perlawanan yang dimaksud adalah para terdakwa tidak di damping oleh penasehat hukum berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa ;

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat

¹³Amran S, Herman (35 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, 5 Februari 2016.

yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”¹⁴

Adanya Hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum tercantum dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Namun kesempatan itu tidak mampu digunakan oleh para terdakwa dalam upaya pembelaan pada kasus pertambangan pasir ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Terbatasnya pengetahuan tentang hukum menjadi faktor utama banyaknya kasus pertambangan ilegal yang di proses sampai pada putusan hakim di pengadilan tersebut. Hal ini dapat di lihat pada table 1.

Tabel 1.
Daftar perkara pidana pertambangan tahun 2014-2015 Di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

No	Putusan	Tahun	Keterangan putusan
1	257/Pid.Sus/2015/PN Sgm	2015	Banding
2	80/Pid.Sus/2015/PN Sgm	2015	<i>Inkraht</i>
3	49/Pid.Sus/2015/PN Sgm	2015	<i>Inkraht</i>
4	42/Pid.Sus/2015/PN Sgm	2015	<i>Inkraht</i>
5	344/Pid.Sus/2014/PN Sgm	2014	<i>Inkraht</i>
6	285/Pid.B/2014/PN Sgm	2014	<i>Inkraht</i>
7	18/PID.B/2014/PN Sgm	2014	<i>Inkraht</i>

Sumber : Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, 2016.

Pada tabel 1. Ditunjukkan bahwa dari beberapa kasus yang telah ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa menunjukkan minimnya upaya pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa sampai pada upaya hukum tingkat banding. Akan tetapi hal itu bukan alasan untuk tidak memutus suatu perkara pertambangan pasir yang berproses di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

¹⁴Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, pasal 56 ayat (1).

2. Non litigasi

Penyelesaian perkara di luar pengadilan atau yang di kenal dengan istilah non litigasi di atur dalam pasal 10 angka 10 undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, cara penyelesaiannya antara lain:

- a) Konsultasi
- b) Negoisasi
- c) Mediasi
- d) Konsiliasi atau
- e) Penilaian ahli

Rumitnya pengurusan permohonan ijin usaha yang mendorong banyaknya pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Gowa. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu jika menambang harus memerlukan ijin usaha atau pun kontrak kerja sehingga Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi menjadi alternatif dan lebih disukai daripada menggunakan hukum formal yang bersifat kaku dan dinilai salah secara moral. Adanya “jarak” antara hukum Negara dengan kenyataan sosial yang berlaku.¹⁵ Langkah ini di ambil oleh para pelaku tambang di kabupaten gowa karena adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak terkait yang terlibat langsung

¹⁵H.Salim HS., S.H.,M.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010), h. 379.

dalam penyelidikan dan pengawasan di lapangan diantaranya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan pertambangan dan energi tidak lagi di bawah Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) kabupaten/kota. dan pengambil alihan kewenangan itu tertuang dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SE/2015 dan surat edaran Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI Nomor 4.E/20/DjB/2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba). Maka dalam hal ini Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Gowa tidak lagi memiliki wewenang melayani perizinan sektor pertambangan dan tidak lagi berwenang mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran izin usaha pertambangan. Berkurangnya tugas pokok dinas pertambangan dan energi kabupaten gowa dapat di manfaat para pengusaha melakukan kegiatan usaha pertambangan secara ilegal khususnya tambang galian C yang banyak di jumpai di daerah-daerah perbatasan kabupaten gowa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Basri Dg Gading (Mantan Terpidana) pada perkara No : 49/Pid Sus/2015/PN.Sgm mengatakan:

“Ini baru ini didapat lagi mesinnya tidak ji. Kenapa saya ji yang masuk di rutan padahal sama-sama ji didapat saya Cuma pakai alkon. dia bebas hanya disuruh wajib lapor saja tiap minggu. itu juga masalah izin usaha tidak ada ji pokoknya orang gowa pergi tambang pasir tidak pke izin usaha cuma ada PNBK di dalam

na orang jadi menambang. padahal dinas pertambangan sama anggota DPR selalu datang kelokasiku tidak ada masalah apa ”.¹⁶

Setelah mendengar dan mengamati hasil wawancara tersebut, maka perlu disimpulkan bahwa ada permufakatan jahat yang telah terjadi antara pelaku penambangan liar atau ilegal dengan aparat terkait berdasarkan pasal 108 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa

“Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penidik”.¹⁷

Adanya surat edaran tersebut kurang diketahui oleh masyarakat di Desa mandalle khususnya bagi para penambang pasir. Sehingga mengetahui hal tersebut dinas terkait hanya mengeluarkan kebijakan wajib lapor tiap minggu dan membayar iauran PNBP (pendapatan Negara Bukan Pajak). Namun tidak adanya bentuk transparansi informasi publik yang mana telah di atur dalam ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.¹⁸

¹⁶Basri Dg. Gading, (44 tahun), mantan Narapidana kasus pertambangan ilegal, No Perkara 49/PidSus/2015/PN.Sgm, Wawancara, Dusun Tamatia Desa Madalle, 8 februari 2016.

¹⁷ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 108 Ayat (2).

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 14 Tahun 2008*, Pasal 1ayat (2)

Jika hal ini terus berlangsung maka dapat disimpulkan bahwa dinas terkait dalam penanganan kasusnya diindikasikan melakukan pembiaran dan tidak berlaku adil.

C. Sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

1. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa

Perkara pidana yang dalam penyelesaiannya hanya sampai pada peradilan tingkat pertama pemberian hukuman oleh majelis hakim berdasarkan dampak yang di timbulkan serta besaran kerugian negara yang di jatuhkan kepada orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

- a. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- b. Pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pada ketentuan disebutkan dengan kata “dan”, hal ini berarti bahwa kepada pelaku dikenakan dua jenis pidana, yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana yang di maksud dalam pasal 158 undang-undang No 4 Tahun 2009. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka majelis hakim dalam putusannya pada perkara No : 49/Pid Sus/2015/PN.Sgm. mengadili sebagai berikut:

- 1) “Menyatakan terdakwa BASRI DG GADING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dendasebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan masa penahanan kota yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar terdakwa di tahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah Alkon warna merah;
 - b) 1 (satu) buah Bom Penghisap air;
 - c) 1 (satu) buah jangkar penghisap Air;
 - d) 2 (dua) buah sekop, *Dirampas oleh Negara*
- 6) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu) rupiah.”¹⁹

Putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim pada perkara No : 49/Pid Sus/2015/PN.Sgm menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang terbukti melakukan usaha penambangan tanpa izin di Dusun Tamatia Desa Mandalle Kec. Bajeng Kab. Gowa dianggap telah sesuai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada Amran S Herman, SH (hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa) mengatakan;

“Masalah denda dendanya tergantung mi nanti di lihat toh, tergantung berapa besar kerugian Negara, itukan wajib itu kena denda tapi ada juga biasa putusan dia tidak kasi kena denda karena dia pikir itu bukan kesalahan dari si penambangnya tapi kesalahannya dari dinas pertambangan izinya orang tidak di kasi keluar segera toh, di tahan-tahan itu padahal dia telah memenuhi syarat formal, itu kita lihat dari sisi situnya kan.”²⁰

Setelah mendengar dan mengamati hasil wawancara terlihat jelas hakim dalam melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan berdasarkan fakta-fakta

¹⁹ Pengadilan Negeri Sungguminasa. *Putusan Perkara No : 49/Pid Sus/2015/PN.Sgm*.

²⁰ Amran S, Herman (35 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, 5 Februari 2016.

yang diungkapkan di pengadilan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan-perbuatan terdakwa telah merugikan negara. Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan di pengadilan, terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum. Sedangkan pidana denda ditentukan dari besar kerugian negara akibat aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwa namun dikatakan pula penjatuhan pidana denda dianggap tidak perlu apabila kesalahan dalam kasus pertambangan bukan dari pihak si penambang.

Menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Apabila kontroversi itu disebabkan oleh penolakan atau ketidakterimaan salah satu pihak yang berperkara tentu saja masih dapat dimaklumi, karena pihak yang kalah seringkali merasa tidak puas, sebaliknya pihak yang menang menilai putusan hakim yang memenangkannya adalah putusan yang adil. Akan tetapi, tidak jarang putusan hakim menimbulkan kontroversi. Bahkan penolakan oleh masyarakat luas karena putusan hakim tersebut bertolakbelakang dengan pemahaman masyarakat atau terjadi ketidakkohrensian antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim.

Banyaknya kasus pertambangan pasir ilegal di Kab. Gowa mencerminkan ada yang salah dari pola/stuktur hidup masyarakat. Hal ini menuntut kejelian aparat hukum yang berwenang menyelenggarakan proses peradilan pidana termasuk hakim di pengadilan. Hakim harus teliti dalam mempertimbangkan putusan untuk kasus-kasus ini, sehingga nantinya tujuan pemidanaan itu tercapai. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pertambangan ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa meliputi alat bukti, unsur-unsur dalam pasal-pasal di dalam tuntutan oleh jaksa, pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang nantinya dipertimbangkan hakim dari surat tuntutan oleh jaksa dan fakta-fakta dipersidangan, pertimbangan berdasarkan surat dakwaan, serta pertimbangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pertambangan ilegal, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Berdasarkan Alat Bukti

Seperti diketahui dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*Absolut*) semua pengetahuan kita hanya sifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar, jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan

ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak diterima sama sekali. Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dapat terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan menyakinkan. Pasal 184 KUHAP yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa maka terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap dirinya dapat dijatuhkan hukuman. Untuk pemeriksaan terhadap barang-barang bukti dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi atau dari terdakwa tentang kebenarannya. Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu pasal 185 KUHAP, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya. Pasal 185 KUHAP, yang berbunyi :

- a) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah: apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.
- d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e) Baik berpendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

- f) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya
 - b. Persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya.
- g) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu.
- h) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- i) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”²¹

Dalam pasal 164 KUHAP, alat bukti berupa keterangan saksi menempati urutan pertama, dalam hal ini, diatur dalam pasal 160 ayat (1) huruf b. KUHAP, yang rumusannya sebagai berikut: “Yang pertama-tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”

Dalam hukum acara pidana yang tidak dapat diambil keterangannya sebagai saksi adalah:

- a) Mereka yang *relatif* tidak berwenang memberi kesaksian, diatur dalam pasal 168 yang berbunyi:

“kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu dan saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwasampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”²²

²¹Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 185.

²² Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 168.

Orang-orang yang tersebut dalam pasal 168 KUHP disebut Relatif tidak berwenang (*Relatif Onbevoegd*) untuk memberi kesaksian, karena jika jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebutmenyetujuinya, maka mereka dapat didengar sebagai saksi (pasal 169 (1) KUHP). Namun demikian, walaupun ketiga golongan tersebut tidak setuju untuk memberi kesaksian, yaitu jaksa,terdakwa, dan orang-orang tersebut di atas, hakim masih bias memutuskan untuk mendengar mereka tetapi hanya untuk memberikan keterangan saja.

b) Mereka yang *Absolut* tidak berwenang memberi kesaksian.

Dalam pasal 171 KUHP, berbunyi sebagai berikut yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
- 2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *Psychopat*, mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Para saksi menurut pasal 265 ayat (3) HIR dan pasal 160 ayat (3) KUHP, sebelum didengar keterangannya, harus disumpah lebih dahulu menurut cara yang

ditetapkan oleh agamanya masing-masing, bahwa mereka akan memberikan keterangan yang mengandung kebenaran dan tidak lain dari pada kebenaran. Penyumpahan semacam ini dinamakan, dilakukan secara "*Promissoris*" (secara sanggup berbicara benar) lain cara ialah: yang dinamakan, secara "*Assertoris*" (menempatkan kebenaran pembicaraan yang telah lalu), yaitu saksi didengar dulu keterangannya, dan kemudian baru disumpah bahwa yang telah diceritakan itu adalah benar. Keterangan Ahli diatur dalam pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah: apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli pada hakikatnya merupakan keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran sejati, ia dijadikan saksi karena keahliannya bukan ia terlibat dalam suatu perkara yang sedang disidangkan. Hakim karena jabatan atau karena permintaan pihak-pihak dapat meminta bantuan seseorang atau lebih saksi saksi ahli, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan obyektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal tertentu.

Kekuatan pembuktian keterangan ahli tersebut, adalah sebagai alat bukti bebas artinya diserahkan kepada kebijaksanaan penilaian hakim; hakim bebas untuk menerima, percaya, atau tidak terhadap keterangan ahli. Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa, pada saat pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitan dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat

memeriksa terdakwa. Berkaitan dengan alat bukti berupa surat diatur dalam pasal 187 KUHAP, yang berbunyi:

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dalam hal ini diatur dalam pasal 187 KUHAP adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan:
- 3) Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.²³

Keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan-laporan itu sebenarnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, tetapi diucapkan secara tulisan. Maka dari itu arti sebenarnya dari pasal tersebut ialah bahwa pejabat-pejabat tersebut dibebaskan dari menghadap sendiri di muka hakim. Surat-surat yang ditanda tangani mereka, cukup dibaca saja dan dengan demikian mempunyai kekuatan sama dengan kalau mereka menghadap di muka hakim dalam sidang dan menceritakan hal tersebut secara lisan. Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-

²³Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 187.

undang maka bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi hakim dengan syarat:

- a) Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
- b) Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum
- c) Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.

Dalam menilai alat bukti surat, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dan hanya alat bukti tersebut di atas yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana. Di antara surat-surat bukti yang bukan surat resmi tersebut, ada segolongan yang penting bagi pembuktian, yaitu surat-surat yang berasal dari atau di tanda tangani oleh terdakwa. Kalau terdakwa mengakui di muka hakim penanda tangannya atau berasal dari atau di tanda tangani oleh terdakwa, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata, surat-surat tidak resmi itu kalaudiakui tanda tangannya oleh yang bersangkutan, mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat hakim, seperti halnya, akte autentik, ini pun lain bagi hakim hukum pidana, yang leluasa untuk tidak menganggap hal tentang sesuatu telah terbukti oleh surat semacam itu, meskipun tanda tangan diakui oleh terdakwa, yaitu hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa. Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHP diatur dalam pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup dengan untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alatbukti yang lain.”²⁴

Menurut ketentuan ayat (2) keterangan terdakwa di luar sidang dapat membantu menemukan bukti di sidang. Pengadilan di luar sidang di sini maksudnya pengakuan yang diberikan terdakwa baik secara lisan atau tulisan di depan penyidik merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa.

Dalam putusan perkara nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Sgm di Pengadilan Negeri Sungguminasa hakim mempertimbangkan segi terbukti tidaknya dakwaan, hal ini terdiri dari dua unsur yaitu pelaku tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan alat bukti.

2. Pertimbangan berdasarkan barang bukti.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Hakim dituntut jeli dalam menentukan pelaku tindak pidana pertambangan ilegal agar menghindari *error in persona* karena di sini banyak sekali pihak yang berkaitan mengingat pertambangan membutuhkan

²⁴Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 189.

banyak tenaga manusia. Penambangan Pasir di kabupaten Gowa banyak dilakukan oleh warga-warga penduduk asli, mereka telah lama melakukan penambangan pasir secara ilegal menggunakan alat seadanya berupa alkon, bom penghisap air, jangkar penghisap air dan skopang. Alat tersebut disita oleh Negara sebagai barang bukti yang mana pada ketentuannya alat tersebut dilarang digunakan dalam aktivitas pertambangan dengan alasan akan menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan.

Sebagaimana kita ketahui putusan hakim adalah puncak dari nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta penguasaan hukum dan fakta, jadi harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis. Maka dalam pencapaian ketiga nilai tersebut Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Kasus Penambangan Ilegal Hakim di dalam menjalankan profesinya lebih diatur dengan undang-undang tersendiri sehingga di dalam mengimplementasikan jabatannya dapat bebas dan mandiri, hasil dari pekerjaannya adalah dapat memberikan keadilan dan kebenaran sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hakim sebagai pegawai negeri sipil harus tunduk pada aturan-aturan kepegawaian dan ketentuan yang digariskan oleh organisasi kepegawaian. Dilain pihak hakim sebagai seorang profesional mempunyai kode etik profesi, harus tunduk dan taat pada kode etik profesinya. Hakim juga dituntut untuk mempunyai moral

(adat istiadat) yang baik sehingga dia dapat menjadicontoh bagi masyarakat sekelilingnya.

Apabila hakim dapat memegang teguh dan menjalankan kode etik profesinya maka sudah dapat diharapkan akan lahir hakim yangberkualitas baik dari segi akhlak (moral) maupun kemampuan intelektulitasnya. Hakim yang demikian adalah Hakim dambaan dari masyarakat dan bangsa sehingga putusannya juga akan lahir putusan yang berkualitas. Putusan berkualitas adalah putusan yang dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, adil, bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu kebebasan meskipun memperoleh pengakuan dalam hukum, namun tidak dapat berhenti padanya, untuk mencapai kebebasan subyek (manusia) harus menegasi hukum. Dia harus mengembangkan moralitas di dalam menghadapi tugas dan kewajibannya lembaga pengadilan melakukan suatu proses pengadilan semenjak perkara diterima,selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa. Oleh Majelis Hakim perkara diperiksadan diputus dan pada akhirnya berakhir pada tahap penyelesaian perkara (minutering). Puncak dari proses peradilan adalah pada tahap pengambilan putusan oleh Majelis Hakim. Pada tahap ini kepribadian (pribadi) hakim begitu besar pengaruhnya terhadap putusan dan hasil putusannya. Hakim yang matang jiwanya, berdedikasi tinggi, moralitas dapat diandalkan, berwawasan luas, sabar, disiplin, tanggap, tangguh, pekerja keras, adil, jujur, berintegritas tinggi terhadap tugas-tugasnya, memegang teguh etikaprofesi maka akan diharapkan muncul putusan

pengadilan yang berkualitas. Tetapi apabila sebaliknya maka jelas putusan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Hakim di dalam menjalankan fungsinya dari penelitian diperoleh hasil tidak dapat terlepas dari faktor-faktor luar yang secara langsung memberikan pengaruh. Pengaruh tersebut berasal dari lingkungan kerja, masyarakat, saksi-saksi maupun dari terdakwa. Demikian pula pengaruh teman seprofesi maupun pembantu tugas pokok pemeriksaan perkara.

Memang secara teoritis kemandirian dan kebebasan hakim oleh Undang-Undang dijamin eksistensinya. Tidak ada kekuasaan lain yang diperbolehkan untuk mencampuri kekuasaan kehakiman. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa hakim memang sering mendapatkan pengaruh baik dari terdakwa, keluarga terdakwa maupun pihak-pihak tertentu, hal ini tergantung pada hakim yang memutus, apabila pribadi hakim teguh pada pendirian dan menguasai permasalahan, tidak ada kendala yang berarti dalam memeriksa dan mengambil keputusan.

Dalam penanganan kasus penambangan pasir ilegal di Kabupaten Gowa. Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan

dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis(vonnis). Setiap putusan memang hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim.

Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Dengan demikian, fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan instrumen bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi kenyataan (*to be reality*). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum bersalah. Dalam konteks hubungan fakta hukum dengan putusan hakim, maka jelas bahwa fakta hukum yang membuat dugaan-dugaan atau dakwaan-dakwaan pihak penuntut umum dalam perkara pidana menjadi terbukti atau tidak terbukti. Demikian pula dalam perkara perdata dan tatausaha negara, fakta hukum terjelma dalam pembuktian atas gugatan penggugat dan bantahan tergugat dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan sisi sebuah putusan hakim. Tanpa fakta hukum, maka sesungguhnya tidak ada putusan hakim.

Setiap putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang jelas. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau “*das solen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma juga diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan larangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya yang demikian itu, tentu saja norma harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhi.²⁵

Dengan demikian, baik fakta hukum, norma, moral maupun doktrin hukum sesungguhnya merupakan instrumen otentik bagi hadirnya putusan hakim yang baik. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada kasus pertambangan pasir ilegal Kabupaten Gowa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut menjatuhkan hukumam berupa sanksi berdasarkan pembuktian pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 27

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses penyelesaian tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Gowa memiliki dua jenis proses; yakni litigasi dan nonlitigasi.
2. Sanksi yang dijatuhkan pada kasus *illegal mining* pada kasus penambangan pasir ilegal berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Namun pada kenyataannya sanksi yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa berupa sanksi pidana.

B. Implikasi

1. Upaya penyelesaian kasus pertambangan galian golongan C di Kabupaten Gowa dengan berlandaskan pada ketentuan yang telah ditetapkan yakni upaya litigasi dan nontiligasi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat serta pemahaman adanya konsekuensi hukum berupa sanksi pidana akibat penambangan yang dilakukan secara liar atau tanpa persetujuan dari pihak yang terkait.
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa pada kasus *illegal mining* diharapkan berdampak pada efek jera bagi para pelaku tambangan pasir ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Ahmad. *Sejarah dan Kedudukan Bw Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Amriani, Nurmaningsih. *MEDIASI alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Cet 1; Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Guse, Prayudi, *Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting Untuk Diketahui*. Jakarta: Roya book, 2008.
- Hadi, Gunarto. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002.
- Kiddler, Louise. *Research Methods In Sicial Relation*, dalam Sugiono, Metode Penelitian Administrasi Cet. XII : Bandung: Alfabeta, 2005.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) Jilid I*, Jakarta: Lentera Abadi. 2010
- Muladi. *Teori – teori Kebijakan Pidana*, Bandung: PT.Alumni, 1994.
- “Moral”. Wikipedia Indonesia. <http://id.wikipedia.org/wiki/Moral> . (Di Akses 16 Maret 2016).
- Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Cet. XII; Jakarta: PT Bulan Bintang, 2008.
- Pemerintah Kabupaten Gowa, “ Dinas Pertambangan Energi”, *Official Website Pemerintah Kabupaten Gowa*, <http://gowakab.go.id/skpd-gowa/dinas/dinas-pertambangan-energi> ,(Diakses pada, 9 Maret 2016).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara 1945*.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara(Minerba)*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 14 Tahun 2008*.

- Republik Indonesia, *UU Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai*.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Resosoedarmo, Soedjiran dkk., *Pengantar Ekologi*. Bandung: Rosda. 1993
- Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa”, *Situs Resmi Pengadilan Negeri Sungguminasa*. http://www.pnsungguminasa.go.id/ver3/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=108. (Diakses pada, 22 Februari 2016).
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sitorus, Felix MT. *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria*. Bndung; Yayasan Akatiga, 2002.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*, Jakarta: Mizan, 1997.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa. 1994
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2002.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YERANG
Pekerjaan : JURUSAN
Alamat : BURESUMBA

Menerangkan bahwa:

Nama :
Nim :
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

()
Narasumber

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basri Dy. Gading
Pekerjaan : Pengusaha Babu Baba
Alamat : Bayung Barab

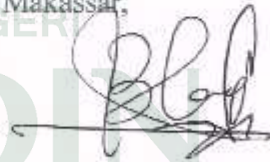
Menerangkan bahwa:

Nama : Riswandi
Nim : 0680042076
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,



(Basri Dy. Gading)

Narasumber

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIRAN S. HERMAN, SH. MH
Pekerjaan : HAKIM
Alamat : 76 USMAN SALBINGKE NO. 103

Menerangkan bahwa:

Nama :
Nim :
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar,

(Amran S. Herman) SH. MH

Narasumber



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata,Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/407/2016
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 26 Januari 2016

Kepada

Yth. Ketua pengadilan Negeri Kelas 1B Sungguminasa
Gowa

Di-
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswi UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: RISWANDI
N I M	: 10500112076
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Samata, Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :

“penyelesaian tindak pidana pertambangan berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (studi kasus di Pengadilan negeri Sungguminasa)”

Dengan dosen pembimbing:

1. Dr. Jumadi, SH., MH.
2. Dr. M. Thahir Maloko, Mli.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Gowa terhitung mulai tanggal 27 Januari s/d 27 Februari 2016.

Demikian harapan kami dan terima kasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 SamataSungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/402/2016
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 26 Januari 2016

Kepada

Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
c.q Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel

Di-
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswi UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: RISWANDI
N I M	: 10500112076
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Ilm u Hukum
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Samata, Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

“penyelesaian tindak pidana pertambangan berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (studi kasus di Pengadilan negeri Sungguminasa)”

Dengan dosen pembimbing:

1. Dr. Jumadi, SH., MH.
2. Dr. M. Thahir Maloko, MHi.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Gowa terhitung mulai tanggal 27 Januari s/d 27 Februari 2016.

Demikian harapan kami dan terima kasih.
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb





PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

JALAN USMAN SALENGKE NO. 103 TELP. (0411) 861129-861089
SUNGGUMINASA - KABUPATEN GOWA 92111

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U3 / 28 / HK / IV / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa :

N a m a : Riswandi
Nomor Induk Mahasiswa : 10500112076
Program Studi : Ilmu Hukum
J u r u s a n : Syari'ah dan Hukum
Jenis kelamin : Laki-laki
Fakultas/Universitas : Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makakassa.
A l a m a t : Samata.

Telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*Penyelesaian tindak Pidana Pertambangan Berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* " (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa) ".

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada Peneliti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 12 April 2016.

PANITERA MUDA HUKUM
PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA



Abd. Latif, SH.

NIP. 19650920 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 2 Februari 2016

K e p a d a

Nomor: 070/ 143 /BKB.P/2016

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa

Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 01097/P2T-BKPM/19.36P/VII/01/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Riswandi
Tempat/Tanggal Lahir	: Ujung Pandang, 16 Mei 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Bontonompo

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat saudara yang berjudul : **"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA)"**.

Selama	: 28 Januari s/d 28 Februari 2016
Pengikut	: Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. KEPALA BADAN
SEKRETARIS,


DRS. H. SYAMSU ALAM, MM

BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Tamangapa Raya, Antang Komp. BTN Ranggong Permai Blok C8 Nomor 9, Kota Makassar pada tanggal 16 Mei 1993. Anak kedua dari empat bersaudara, terlahir dengan nama Riswandi Amir. Pendidikan dasar ditempuh di mulai pada tingkat SDN (Sekolah Dasar Negeri) di SDN Inpres Antang I pada tahun 1999 dengan jangka waktu enam tahun, dan lulus pada tahun 2005. Pendidikan Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 17 Makassar pada tahun 2005, dengan jangka waktu tiga tahun, lulus pada tahun pelajaran 2008. Pendidikan Menengah Atas ditempuh di SMK Negeri 05 Makassar, dengan jangka waktu empat tahun, lulus pada tahun 2012. Perguruan Tinggi ditempuh di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2012, dengan jangka waktu 3 Tahun 7 Bulan, Tahun ajaran 2015-2016 dengan IPK 3,55.

Penulis juga aktif melakukan kajian Hukum pada Lembaga Independen disebut Fighter of law di sekretariat FOL Paccinongan Samata, dan menjadi salah satu anggota PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).